



RENCANA KERJA

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

BAB I

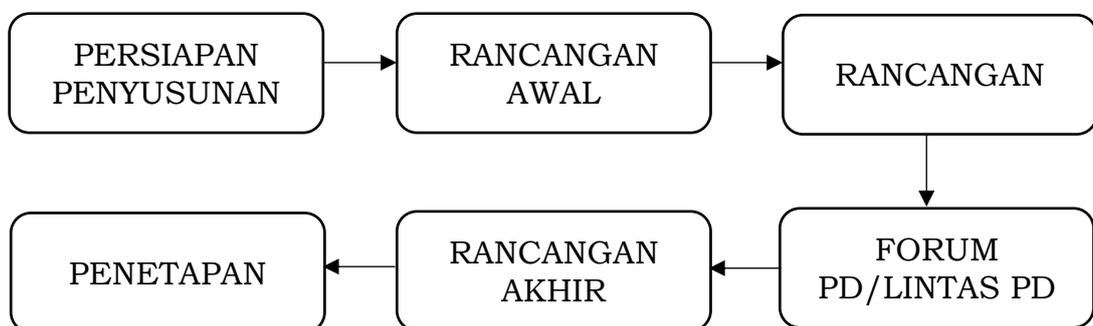
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Dalam rangka penyusunan Renja, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan. Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tahapan:

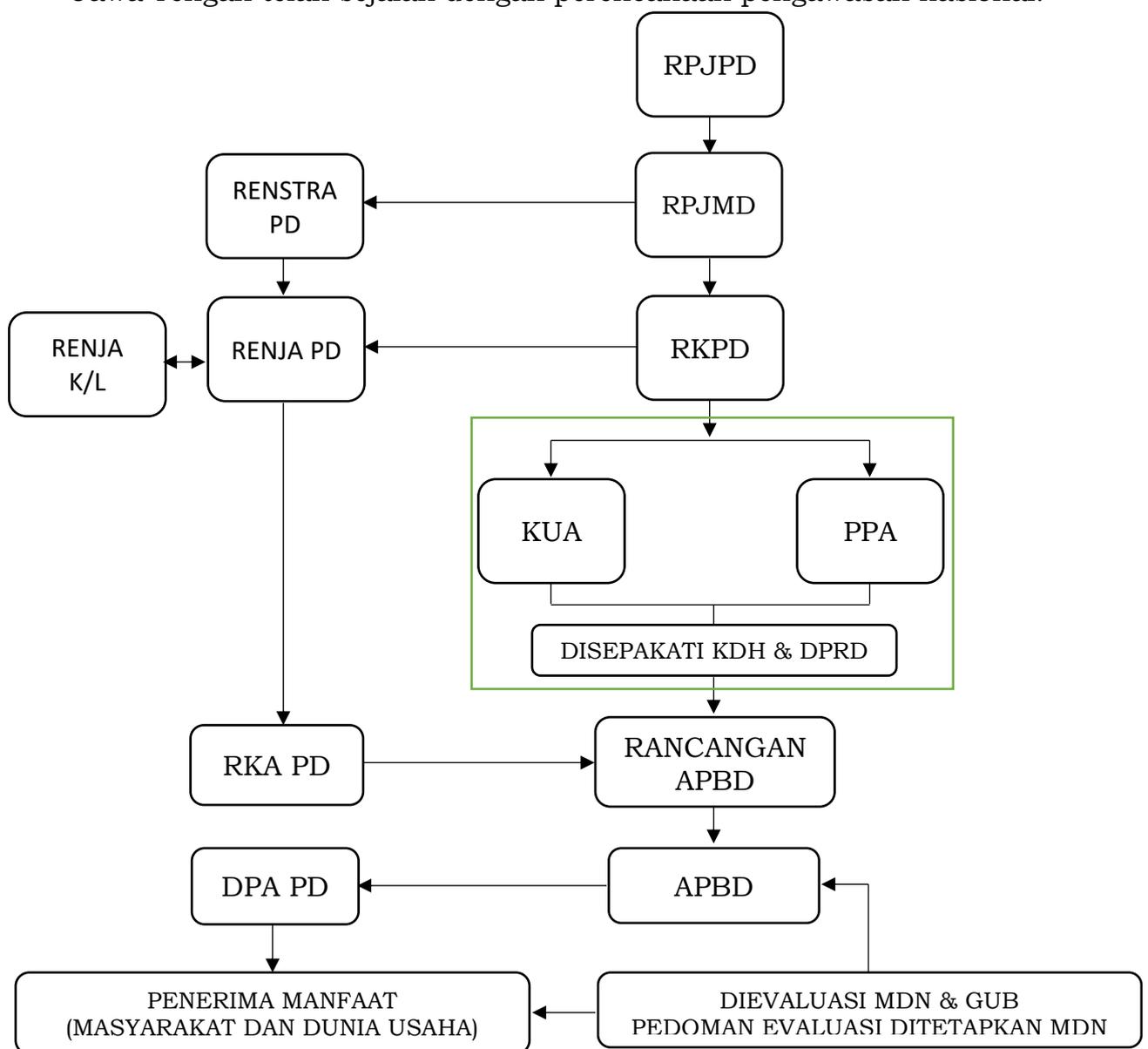
1. Persiapan penyusunan dengan pembentukan tim penyusunan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD; dan
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.



GAMBAR 1.1

Tahapan Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, hasil evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun lalu (2019), dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2020). Berpedoman pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah juga mempertimpangkan Renja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi pembina, untuk memastikan bahwa fokus pengawasan Inspektorat Jawa Tengah telah sejalan dengan perencanaan pengawasan nasional.



GAMBAR 1.2

Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD yang kemudian dijabarkan ke dalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD. Seluruh program selama lima tahun memedomani program prioritas dalam RPJMD. RPJMD dilaksanakan melalui RKPD. Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) ke dalam kegiatan prioritas. RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 adalah:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/98, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
25. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
26. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
27. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang PMPRB;
 42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
 43. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 44. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB Secara Online;
 45. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
 47. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 48. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 49. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 50. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 51. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
 52. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disusun dengan tujuan :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2021 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020;
- b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 pada tahun ke-3 periode Tahun 2021.
- c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
- 2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

- 3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Tugas Pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Tujuan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah terwujudnya penguatan peran pengawasan intern dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan untuk sasaran strategisnya yaitu:

1. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP, dengan Indikator Kinerja Kapabilitas APIP level 3 pada elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, serta Struktur dan Tata Kelola;
2. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP, dengan Indikator Kinerja Maturitas SPIP Nilai 3,5 pada unsur :
 - a) Lingkungan Pengendalian
 - b) Penilaian Risiko
 - c) Kegiatan Pengendalian
 - d) Informasi dan Komunikasi
 - e) Pemantauan dan Pengendalian Intern.

Anggaran yang dikelola Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 sebesar Rp 45.266.934.000,- dengan realisasi mencapai Rp 44.010.257.937,- atau 97,22% dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 19.266.934.000,- dengan realisasi Rp 18.996.726.504,- atau 98,6%

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 26.000.000.000,- dengan realisasi Rp. 25.013.530.893,- atau 96,21%

Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

| NO | PROGRAM | FAKTOR PENYEBAB | IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM RENSTRA | KEBIJAKAN/ TINDAKAN UTK MENGATASI |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Proses Perencanaan belum selaras antara Renstra dan Renja dan Renstra Inspektorat belum pernah di reviu; • Dalam pengukuran kinerja belum ada ukuran kinerja | Target: 84 Capaian: 83,55 Perlu meningkatkan aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan Renstra dan Renja dan menyusun tim Reviu Renstra Inspektorat; • Kinerja Eselon III dan IV sudah disusun |

| NO | PROGRAM | FAKTOR PENYEBAB | IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM RENSTRA | KEBIJAKAN/ TINDAKAN UTK MENGATASI |
|----|---------|---|--|--|
| | | <p>tingkat Eselon III dan IV dan pengukuran kinerja belum sepenuhnya berjenjang;</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan guna pengendalian capaian dan sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. | <p>evaluasi internal, dan pencapaian sasaran</p> | <p>Perjanjian Kinerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Perlunya Rakor Pengendalian intern secara berkala sehingga dapat mengetahui permasalahan yang ada. |

Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

| NO | PROGRAM | FAKTOR PENYEBAB | IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM RENSTRA |
|----|--|---|--|
| 1 | Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat | | |
| | Level 3 Penuh Kapabilitas APIP | Komitmen dari Para Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah | <p>Target: Level 3 DC (2 elemen) Capaian: Level 3 Penuh</p> <ul style="list-style-type: none"> Dapat lebih mewujudkan peran APIP yang efektif baik dari sisi <i>quality assurance</i> maupun <i>consulting partner</i> |
| 2 | Manajemen Resiko | | |
| | Nilai 3,5 Maturitas SPIP | Komitmen dari Pimpinan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah | <p>Target: Level 3,10 Capaian: Level 3,158</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspektorat telah menetapkan, mengkomunikasikan, dan melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian atas kegiatan pokok SKPD Inspektorat telah melaksanakan pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik namun evaluasi atas pengendalian intern belum terdokumentasi dengan memadai |
| 3 | Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | | |
| | Nilai Kepuasan Masyarakat | Komitmen dari Pimpinan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah | <p>Target: 87,3 Capaian: 88,69</p> <ul style="list-style-type: none"> Dapat menggambarkan seberapa puas pelanggan terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada aspek |

| NO | PROGRAM | FAKTOR PENYEBAB | IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM RENSTRA |
|----|---------|--------------------|--|
| | | | penguasaan materi pengawasan, aspek penyampaian komunikasi, aspek pelaksanaan standar audit, kode etik, dan aspek manfaat hasil pemeriksaan. |

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Pencapaian Renstra lebih detail dapat diketahui dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah s/d Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah

| Kode | Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg. | Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Keg. (Output) | Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018- 2023 (%) | Target Prog.& Keg. Renja Thn 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2020 | | | | |
|------|---|---|--|---|--|--|-------------------------|---|--|---|---|----|----|-----|
| | | | | | Target Renja Itprov Thn 2019 | Realisasi Renja Itprov Thn 2019 | Tk. Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2020 | Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | |
| 4 | 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 15 | 001 | Audit Kinerja | Jumlah hasil audit yang dihasilkan wilayah I | 148 | 72 | 36 | 36 | 100 | 72,97 | 10 | 10 | 100 |
| | | | | | Jumlah hasil audit yang dihasilkan wilayah II | 148 | 72 | 36 | 36 | 100 | 72,97 | 10 | 10 | 100 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg. | Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Ke g. (Output) | Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018- 2023 (%) | Target Prog.& Keg. Renja Thn 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2020 | |
|------|----|----|-----|---|--|--|---|--|--|-------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Itprov Thn 2019 | Realisasi Renja Itprov Thn 2019 | Tk. Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2020 | Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4 | 05 | 15 | 005 | Audit Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan di wilayah I | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100 | |
| | | | | | Jumlah Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan di wilayah II | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100 | |
| | | | | | Jumlah Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan di wilayah III | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 20 | |

| Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg. | Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Ke g. (Output) | Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018- 2023 (%) | Target Prog.& Keg. Renja Thn 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2020 | |
|------|------|------|------|---|--|--|---|--|--|-------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Itprov Thn 2019 | Realisasi Renja Itprov Thn 2019 | Tk. Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2020 | Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | | | | Jumlah Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan | 189 | 30 | 15 | 15 | 100 | 23,81 | 36 | 36 | 100 |
| 4 | 05 | 15 | 006 | Pengawasan Lainnya | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Lainnya yang dihasilkan di wilayah I | 15 | 0 | 3 | 3 | 100 | 20 | 3 | 3 | 100 |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Lainnya yang dihasilkan di wilayah II | 15 | 0 | 3 | 3 | 100 | 20 | 3 | 3 | 100 |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan | 15 | 0 | 3 | 3 | 100 | 20 | 3 | 3 | 100 |

| Kode | | | Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg. | Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Ke g. (Output) | Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018- 2023 (%) | Target Prog.& Keg. Renja Thn 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2020 | | |
|------|----|----|---|---|--|---|--|--|-------------------------|---|--|---|---|-----|
| | | | | | | | Target Renja Itprov Thn 2019 | Realisasi Renja Itprov Thn 2019 | Tk. Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2020 | Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| | | | | Lainnya yang dihasilkan di wilayah III | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Lainnya yang dihasilkan | 15 | 0 | 3 | 3 | 100 | 20 | 3 | 3 | 100 | |
| 4 | 05 | 18 | | Peningkatan Profesionalism e dan Kompetensi APIP | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 18 | 001 | Sertifikasi APIP | Jumlah APIP yang berlisensi nasional/inter nasional | 10 | 0 | 2 | 2 | 100 | 20 | 4 | 4 | 40 |
| 4 | 05 | 21 | | Peningkatan Manajemen Mutu | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 21 | 001 | PKPT Berbasis | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg. | Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Ke g. (Output) | Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018- 2023 (%) | Target Prog.& Keg. Renja Thn 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2020 | |
|------|----|----|-----|---|---|--|---|--|--|-------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Itprov Thn 2019 | Realisasi Renja Itprov Thn 2019 | Tk. Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2020 | Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | | | Risiko | Dokumen PKPT Berbasis Risiko | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 21 | 002 | Surveillance ISO | Jumlah Dokumen Surveillance ISO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 4 | 05 | 20 | | Pembangunan Budaya Integritas | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 20 | 001 | Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi | Jumlah dokumen pencegahan dan pemberantasa n korupsi | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 4 | 05 | 22 | | Program Manajemen Risiko | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 22 | 001 | Pemetaan Risiko | Jumlah dokumen peta | 48 | 48 | 48 | 48 | 100 | 100 | 48 | 48 | 100 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg. | Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Ke g. (Output) | Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018- 2023 (%) | Target Prog.& Keg. Renja Thn 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2020 | |
|------|----|----|-----|---|--|--|---|--|--|-------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Itprov Thn 2019 | Realisasi Renja Itprov Thn 2019 | Tk. Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2020 | Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | | | | risiko PD | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 22 | 002 | Sapu Bersih Pungutan Liar | Jumlah dokumen pemetaan Kegiatan Saber Pungli | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | 100 | 35 | 35 | 100 |
| 4 | 05 | 01 | | Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 01 | 001 | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan PD | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 3 | 3 | 100 |
| 4 | 05 | 22 | 002 | Kegiatan | Jumlah bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 12 | 12 | 100 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg. | Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Ke g. (Output) | Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018- 2023 (%) | Target Prog.& Keg. Renja Thn 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2020 | |
|------|----|----|-----|---|--|--|---|--|--|-------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Itprov Thn 2019 | Realisasi Renja Itprov Thn 2019 | Tk. Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2020 | Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | | | Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | terpenuhinya kegiatan | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 22 | 003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| 4 | 05 | 22 | 004 | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| 4 | 05 | 22 | 005 | Kegiatan Penyediaan Jasa | Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 12 | 12 | 100 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg. | Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Ke g. (Output) | Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018- 2023 (%) | Target Prog.& Keg. Renja Thn 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2020 | |
|------|----|----|-----|--|--|--|---|--|--|-------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Itprov Thn 2019 | Realisasi Renja Itprov Thn 2019 | Tk. Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2020 | Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | | | Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 22 | 006 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| 4 | 05 | 22 | 007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan dan Minuman Rapat | Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| 4 | 05 | 22 | 008 | Kegiatan Penyediaan Bahan | Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 12 | 12 | 100 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg. | Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Keg. (Output) | Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018- 2023 (%) | Target Prog.& Keg. Renja Thn 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2020 | |
|------|----|----|-----|--|---|--|---|--|--|-------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Itprov Thn 2019 | Realisasi Renja Itprov Thn 2019 | Tk. Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2020 | Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | | | Bacaan/Buku Perpustakaan | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 22 | 009 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rum ah Dinas/Gedung Kantor/Kenda raan Dinas Operasional | Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| 4 | 05 | 22 | 010 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga | Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| 4 | 05 | 22 | 011 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan | Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 12 | 12 | 100 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg. | Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Ke g. (Output) | Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018- 2023 (%) | Target Prog.& Keg. Renja Thn 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2020 | |
|------|----|----|-----|---|--|--|---|--|--|-------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Itprov Thn 2019 | Realisasi Renja Itprov Thn 2019 | Tk. Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2020 | Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | | | Prasarana Kantor | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 22 | 012 | Kegiatan Rehab Gedung Kantor | Jumlah unit gedung yang direhab | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 4 | 05 | 22 | 013 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas | Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
| 4 | 05 | 22 | 014 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 05 | 22 | 015 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Worksh op/ Bintek/ Seminar | 1250 | 0 | 250 | 250 | 100 | 20 | 250 | 250 | 100 |
| 4 | 05 | 22 | 016 | Kegiatan Pelayanan Informasi | Jumlah laporan informasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg. | Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Ke g. (Output) | Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2018- 2023 (%) | Target Prog.& Keg. Renja Thn 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2020 | |
|------|----|----|-----|---|--|--|---|--|--|-------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Itprov Thn 2019 | Realisasi Renja Itprov Thn 2019 | Tk. Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2020 | Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | | | Perangkat Daerah | publik perangkat daerah | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 22 | 023 | Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| 4 | 05 | 02 | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 02 | 001 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan PD | Jumlah dokumen perencanaan PD yang di susun | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 4 | 4 | 100 |
| 4 | 05 | 02 | 002 | Kegiatan | Jumlah | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 6 | 6 | 100 |

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Capaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dapat diketahui dari Tabel berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

| No | Indikator | SPM/St andar Nasional | IKK | Target Renstra | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Level 3 Penuh Kapabilitas APIP | - | | Level 3 DC (2 elemen) | Level 3 Dc (1 elemen) | Level 3 Penuh | Level 3 Penuh | Level 3 Penuh | Level 3 Penuh | Level 3 Penuh | Level 3 Penuh | |
| 2 | Nilai 3,5 Maturitas SPIP | - | | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,158 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | |
| 3 | Nilai Kepuasan Masyarakat | - | | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 88,69 | 88,69 | 87,3 | 87,3 | |
| 4 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | - | | 84 | 85 | 86 | 87 | 83,55 | 85 | 86 | 87 | |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Jawa Tengah.

Tabel 2.3
Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tupoksi
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

| Tupoksi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|--|---|--|
| <p>Tugas: Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah provinsi; dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas; 2. Penerapan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum optimal pada lingkup SKPD Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. | <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan; 2. Penerapan Manajemen Risiko belum dijalankan dengan maksimal 3. Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik <p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan 2. Sinergitas dari seluruh <i>stakeholder</i> dalam mencapai target yang ditetapkan |

Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2018-2023 adalah “Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
- b. Mempercepat Reformasi Birokrasi yg dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sebagai upaya mewujudkan misi-misi di atas, disusunlah program-program kerja utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- a. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
- b. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah & guru ngaji;
- c. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi;
- d. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
- e. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
- f. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
- g. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
- h. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
- i. Rumah Sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
- j. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi kedua, yaitu “Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota”. Selain itu secara tersirat, Inspektorat juga memiliki peran terhadap misi keempat, yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”, dalam konteks bahwa Inspektorat juga turut serta mewujudkan kualitas SDM APIP yang lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih profesional lagi ke depannya.

Sementara untuk Program Kerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah:

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK
 - a. Inspektorat sebagai fasilitator masuknya kurikulum yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada jenjang Pendidikan SMA/SMK
 - b. Inspektorat melaksanakan sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Inspektorat Goes To School dan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar melalui *Saber Goes To School* pada SMA/SMK se-Jawa Tengah sebagai pondasi awal Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Anti Pungli.

2. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi.
Secara sederhana, hal tersebut dapat dibaca sebagai Pemerintah Provinsi tidak hanya fokus pada percepatan Reformasi Birokrasi di tingkat Provinsi saja, tetapi juga mendorong dan mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayahnya masing-masing.

3. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni
Inspektorat sebagai aparat pengawas berkontribusi terhadap program penanggulangan kemiskinan di Desa Turirejo Kabupaten Demak melalui Gerakan 1 OPD 1 Desa Dampungan.

Adapun dampak yang timbul terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah terhadap capaian program Nasional, seperti SDGs yang tertuang pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, khususnya Tujuan 16, yaitu Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan; Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua; Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di semua Tingkatan. Terkait dengan hal tersebut, perilaku anti korupsi sangat ditekankan untuk dikembangkan dalam masyarakat Indonesia. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ikut berperan aktif dalam menumbuhkan perilaku anti korupsi dimulai dari lingkungan yang paling mendasar dan dimulai sejak dini yaitu melalui sekolah-sekolah SMA/SMK se-Jawa Tengah.

Saat ini terdapat isu strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dalam perkembangannya, pengaturan Inspektorat Daerah belum mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur:

- penguatan fungsi inspektorat Daerah;

- penugasan inspektorat Daerah dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah;
- pelaporan hasil pengawasan inspektorat Daerah yang terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah kepada Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan supervisi pelaporan yang melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah;
- penambahan inspektur pembantu;
- peran Pemerintah Pusat dalam pengisian jabatan inspektur Daerah dan inspektur pembantu;
- mekanisme konsultasi dalam pemberhentian dan mutasi inspektur Daerah dan inspektur pembantu.

Terkait adanya Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 maka diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Maka selanjutnya penetapan tujuan dan sasaran nantinya harus mengacu pada misi dan program kerja yang sesuai.

Tabel 2.4
Tabel Analisis Lingkungan Internal

| Aspek | Kekuatan (<i>Strengths</i>) | Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) |
|----------------------|--|---|
| Sistem/ Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Sistem pelaporan dan tindak lanjut terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan) 3. Penerapan E-Audit dalam proses pemeriksaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemeriksaan yang masih rendah ditandai dengan produktivitas hasil pengawasan dan keterlambatan penerbitan LHP; 2. Belum adanya sistem pengendalian terhadap mutu dan kualitas hasil pengawasan. |
| Kelembagaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan dan Pelatihan di bidang pengawasan secara periodik 2. Adanya Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) yang melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan sewaktu-waktu dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 3. Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat Propinsi Jawa Tengah dengan stakeholder terkait | <p>Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu PFA dan P2UPD yang belum jelas.</p> |
| Sumber Daya Manusia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawas yang dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan auditor sangat tinggi 2. Memiliki APIP bersertifikat nasional/internasional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kuantitas tenaga Pengawas (PFA dan P2UPD) 2. Masih adanya perilaku tenaga pemeriksa yang belum mencerminkan kode etik dan norma audit yang berlaku. |

| Aspek | Kekuatan (<i>Strengths</i>) | Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) |
|----------------------|---|---|
| Sumber Daya Anggaran | Anggaran yang terus meningkat menandakan komitmen dan keseriusan Kepala Daerah dalam penguatan pengawasan | Terbatasnya dukungan anggaran operasional untuk prasaranapemeriksaan |
| Lingkungan Strategis | <ol style="list-style-type: none"> Dukungan Kepala Daerah dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah dalam penguatan peran Inspektorat Keberadaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka kegiatan pengawasan | Kurangnya komunikasi kepada <i>stakeholder</i> terkait (LSM, Akademisi, masyarakat) |

Tabel 2.5
Tabel Analisis Lingkungan Eksternal

| Aspek | Peluang (<i>Opportunities</i>) | Tantangan (<i>Threats</i>) |
|------------------|--|---|
| Sistem/kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> Komitmen unsur pimpinan daerah (Gubernur, DPRD, Sekda, dan SKPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terbitnya peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 membuka peluang penguatan peran Inspektorat | <ol style="list-style-type: none"> Keinginan dari <i>stakeholders</i> bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan di Unit Kerjanya; Upaya mempertahankan opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian", Inspektorat perlu berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas Reviu atas Laporan Keuangan Isu eselonering sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan SOTK Inspektorat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan SDM baik |

| Aspek | Peluang (<i>Opportunities</i>) | Tantangan (<i>Threats</i>) |
|----------------------|--|--|
| | | dari sisi kuantitas maupun kualitas |
| Kelembagaan | Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai <i>consulting partner</i> bagi SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pola Pembinaan P2UPD dari Kementerian Dalam Negeri belum jelas 2. Inspektorat memiliki banyak “atasan” di tingkat pusat |
| Sumber Daya Manusia | Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan karir dan kompetensi terbuka luas | Penentuan formasi dan kebutuhan tenaga pemeriksa tergantung dari kebijakan Pemerintah Provinsi (Badan Kepegawaian Daerah) |
| Lingkungan Strategis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan mitra seperti BPK dan BPKP atas hasil pengawasan di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2. Dukungan KPK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi 3. Adanya aduan masyarakat tentang KKN kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kepercayaan dari LSM maupun elemen masyarakat terhadap eksistensi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, karena dianggap tidak mampu menemukan penyimpangan-penyimpangan keuangan Negara/ Daerah 2. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 3. Tuntutan SKPD terhadap peran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai penjamin mutu 4. Semakin bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Provinsi/ |

| Aspek | Peluang (<i>Opportunities</i>) | Tantangan (<i>Threats</i>) |
|-------|-------------------------------------|--|
| | | Kabupaten/Kota yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum 5. Semakin bertambahnya temuan hasil pemeriksaan BPK yang berkembang ke ranah hukum |

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan programstrategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Jawa Tengah 2018-2023.

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|-------------------------------------|-------------|--|----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Jawa Tengah | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan | 100% | 15.419.290 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Jawa Tengah | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan | 100% | 12.304.605 | |
| | | | Persentase Pemantauan Hasil Pemeriksaan | 100% | | | | Persentase Pemantauan Hasil Pemeriksaan | 100% | | |
| | | | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya | 100% | | | | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya | 100% | | |
| a | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jawa Tengah | Jumlah LHA Kinerja yang dihasilkan | 30 laporan | 3.693.788 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jawa Tengah | Jumlah LHA Kinerja yang dihasilkan | 30 laporan | 3.418.020 | Pelaksanaan Kegiatan difokuskan pada |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|----------------------|-------------|--|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|----------------|--------------------------|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| | | | | | | | | | | | pemeriksaan SKPD |
| | | Jawa Tengah | Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi/BPK/ Kementerian/ Lembaga | 84 laporan | 1.895.742 | | Jawa Tengah | Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi/BPK/ Kementerian/ Lembaga | 84 laporan | 1.261.345 | Pelaksanaan Kegiatan difokuskan pada pemeriksaan SKPD |
| | | Jawa Tengah | Jumlah LHE yang dihasilkan | 84 laporan | 3.012.155 | | Jawa Tengah | Jumlah LHE yang dihasilkan | 84 laporan | 1.835.760 | Pelaksanaan Kegiatan difokuskan pada pemeriksaan SKPD |
| | | Jawa Tengah | Jumlah LHR yang dihasilkan | 101 laporan | 1.077.986 | | Jawa Tengah | Jumlah LHR yang dihasilkan | 101 laporan | 893.220 | Pelaksanaan Kegiatan difokuskan pada pemeriksaan SKPD |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|-------------------------|---|--|--------------------------|---|-------------------------|---|----------------|--------------------------|--|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| b | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jawa Tengah | Jumlah LHADTT yang dihasilkan | 114 laporan | 4.188.004 | Audit dengan tujuan tertentu | Jawa Tengah | Jumlah LHADTT yang dihasilkan | 114 laporan | 4.319.480 | Adanya kegiatan pemeriksaan yang dilakukan bersama Inspektorat Kab/Kota |
| | | Jawa Tengah | Jumlah Lap Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan | 12 laporan | 1.551.655 | Pengawasan lainnya | Jawa Tengah | Jumlah Lap Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan | 12 laporan | 576.780 | Pelaksanaan beberapa kegiatan dilaksanakan melalui <i>video conference</i> |
| 2 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Jawa Tengah dan Jakarta | Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas | 87,35 | 5.880.000 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Jawa Tengah dan Jakarta | Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas | 87,35 | 5.854.569 | |
| Nilai Budaya Integritas | | | 83% | Nilai Budaya Integritas | | | | 83% | | | |
| Persentase APIP berlisensi nasional/inter | | | 60% | Persentase APIP berlisensi nasional/intern | | | | 60% | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-------------------------|--|----------------|--------------------------|--|-------------------------|--|----------------|--------------------------|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| | | | nasional | | | | | asional | | | |
| | | | Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko | 100% | | | | Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko | 100% | | |
| a | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jawa Tengah dan Jakarta | Jumlah Dokumen PPKT berbasis risiko | 1 Dokumen | 1.365.000 | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jawa Tengah dan Jakarta | Jumlah Dokumen PPKT berbasis risiko | 1 Dokumen | 1.351.544 | Beberapa kegiatan dilakukan melalui <i>video conference</i> |
| b | Kegiatan Asistensi dan Pendampingan | Jawa Tengah dan Jakarta | Jumlah APIP yang berlisensi nasional/ internasional | 2 orang | 367.500 | Kegiatan Asistensi dan Pendampingan | Jawa Tengah dan Jakarta | Jumlah APIP yang berlisensi nasional/ internasional | 2 orang | 480.000 | Adanya peningkatan jumlah APIP yang mengikuti diklat |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|----------------------|--------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------|---|----------------|--------------------------|--|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| | | | Jumlah dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli | 35 dokumen | 945.000 | | | Jumlah dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli | 35 dokumen | 862.715 | Pengurangan jumlah peserta sosialisasi dan perlengkapan Rakor Saber Pungli |
| | | | Jumlah dokumen pencegahan dan pemberantasan korupsi | 1 laporan | 2.310.000 | | | Jumlah dokumen pencegahan dan pemberantasan korupsi | 1 laporan | 2.371.240 | Penambahan Survey Penilaian Integritas yang dialihkan dari Kegiatan Surveillance ISO |
| | | | Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah | 48 dokumen | 630.000 | | | Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah | 48 dokumen | 592.580 | Pelaksanaan FGD SPIP melalui Video Conference |
| | | | Jumlah Dokumen Surveillance ISO | 1 dokumen | 262.500 | | | Jumlah Dokumen Surveillance ISO | 1 dokumen | 196.490 | Pengalihan Survey Penilaian Integritas pada kegiatan |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|----------------------|--------|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| | | | | | | | | | | | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/0003834 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah wajib melaksanakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bersama pemangku kepentingan. Forum Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 dan memperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|--|-------------|--|-----------------|---|
| 1 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | | | | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jawa Tengah | Persentase Pemantauan Hasil Pemeriksaan | 12 Laporan | Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diharapkan tidak melakukan perannya sebagai <i>watchdog</i> , akan tetapi sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i> → DPRD |
| | | Jawa Tengah | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya | 114 laporan | Pada TA 2021 diharapkan Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah lebih Fokus kepada Pengelolaan Aset → DPRD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diharapkan melaksanakan Audit dana BOS pada SMA / SMK Swasta di Jawa Tengah → Ombudsman Jateng |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|---|-------------------------|---|-----------------|---|
| 2 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | | | | |
| | Kegiatan Asistensi dan Pendampingan | Jawa Tengah dan Jakarta | Jumlah dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli | 35 dokumen | Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Perlu melakukan sosialisasi untuk Penanganan Aduan, juga melakukan sosialisasi terkait Tupoksi Inspektorat ke masyarakat → Ombudsman |

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025 tersebut, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui Sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartaba, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mencapai sasaran pembangunan dan visi misi Presiden maka ditetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, Presiden telah memberikan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 tersebut, yaitu:

1. Pembangunan SDM;

2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi;
5. Transformasi Ekonomi.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi Presiden melalui misi ke-8 “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” yang dijabarkan dengan agenda pembangunan ke-7 “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”. Inspektorat juga dapat berperan dalam penyederhanaan birokrasi sesuai dengan lima arahan Presiden untuk mencapai Visi Indonesia 2045 “Indonesia Maju”.

Implementasi misi ke-delapan dengan agenda prioritas pembangunan nasional ke-tujuh dan arahan Presiden ke-empat tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 ke-empat, yaitu: Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang terkait dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada:

1. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan perkuatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan Perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN
2. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya-upaya *clean and clear government* dan menerapkan “keperantaraan dan *enterpreuneur*” dalam tata kelola pemerintahan

1.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang hendak dicapai pada tahun 2021 adalah: “Terciptanya Penguatan Pengawasan Intern dalam Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik”. Sesuai dengan tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP
2. Tercapainya Nilai 3,3 Maturitas SPIP

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Target |
|------------|---|---|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik | | Level 3 penuh Kapabilitas APIP | 3 |
| | | | Nilai 3,5 Maturitas SPIP | 3.25 |
| | | Tercapainya level 3 penuh Kapabilitas APIP | Level 3 Penuh Kapabilitas APIP 1. "Peran dan Layanan" 2. "Praktik Profesional" 3. "Struktur Tata Kelola" | 3 |
| | | Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP | Maturitas SPIP Nilai 3,5 pada unsur : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern | 3.3 |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah | | Nilai Kepuasan Masyarakat | 87.3 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Kepuasan Masyarakat | 87.3 |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 86 |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Tabel 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Jawa Tengah

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pemb. Nasional | Prioritas Pemb Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2021 | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja | |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------|---|--------|----------|------------|--------|------------|------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|--|--------|
| | | | | Daerah | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | Rp. | | Target | Rp. (000) | | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | | | Target |
| | | | | | Satuan | Volume | | Satuan | Volume | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| 0 | NON URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | NON URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X.XX.01 | Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | | | | | 30.533.733.000 | | 45.991.175 | | Inspektorat | |
| X.XX.01.1.01 | Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja | | | | | | | | | | | | | 229.350.000 | | 203.962 | | | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pemb. Nasional | Prioritas Pemb Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2021 | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja | |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------|------------|--------|----------|--|-----------|---|---------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------|--|--------|
| | | | | Daerah | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | Rp. | | Target | Rp. (000) | | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | | | Target |
| | | | | | Satuan | Volume | | Satuan | Volume | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | 6 Dokumen | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00% | 101.820.000 | 6 Dokumen | 102.962 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN | |
| | | | | | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 4 Dokumen | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00% | 127.530.000 | 4 Dokumen | 101.000 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |
| X.XX.01.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan | | | | | | | | | | | | | 22.692.907.000 | | 33.000.000 | | | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pemb. Nasional | Prioritas Pemb Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2021 | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja | |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------|------------|--------|----------|---|-----------|--|--------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------|--|--------|
| | | | | Daerah | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | Rp. | | Target | Rp. (000) | | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | | | Target |
| | | | | | Satuan | Volume | | Satuan | Volume | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) | 3 Laporan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah | 100.0% | 22.692.907.000 | 3 Laporan | 33.000.000 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |
| X.XX.01.1.03 | Kegiatan Administrasi Umum | | | | | | | | | | | | | 7.057.426.000 | | 11.511.463 | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah | 100.0% | 60.000.000 | 12 Bulan | 22.050 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |
| | | | | | | | | | | Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan | 100.0% | 348.926.000 | 12 Bulan | 750.000 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pemb. Nasional | Prioritas Pemb Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2021 | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja | |
|------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------|------------|--------|----------|--|----------|---|-------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--|--------|
| | | | | Daerah | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | Rp. | | Target | Rp. (000) | | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | | | Target |
| | | | | | Satuan | Volume | | Satuan | Volume | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | | | | | | | | | | Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | | umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | | | | | | UMUM | |
| | | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.% | 1.685.892.000 | 12 Bulan | 2.850.000 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |
| | | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi Air dan Listrik Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.% | 900.400.000 | 12 Bulan | 1.102.500 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pemb. Nasional | Prioritas Pemb Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2021 | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja | |
|------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------|------------|--------|----------|--|----------|---|-------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--|--------|
| | | | | Daerah | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | Rp. | | Target | Rp. (000) | | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | | | Target |
| | | | | | Satuan | Volume | | Satuan | Volume | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.% | 581.600.000 | 12 Bulan | 882.000 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |
| | | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.% | 691.414.000 | 12 Bulan | 170.000 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |
| | | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan | 100.% | 1.520.594.000 | 12 Bulan | 1.878.451 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pemb. Nasional | Prioritas Pemb Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2021 | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja | |
|------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------|------------|--------|----------|---|----------|--|-------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--|--------|
| | | | | Daerah | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | Rp. | | Target | Rp. (000) | | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | | | Target |
| | | | | | Satuan | Volume | | Satuan | Volume | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | | | | | | | | | | Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | | keuangan perangkat daerah | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah | 100.% | 194.100.000 | 12 Bulan | 203.962 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |
| | | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah | 100.% | 194.100.000 | 12 Bulan | 203.962 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pemb. Nasional | Prioritas Pemb Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2021 | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja | |
|------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------|------------|--------|----------|--|-----------|--|-------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--|--------|
| | | | | Daerah | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | Rp. | | Target | Rp. (000) | | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | | | Target |
| | | | | | Satuan | Volume | | Satuan | Volume | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | | | | | | | | | | Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah | 1 Laporan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah | 100.% | | 1 Laporan | 441.000 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Unit Gedung yang direhab | 1 unit | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah | 100.% | | 1 unit | 1.220.500 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |
| | | | | | | | | | | Jumlah unit Kendaraan Dinas yang diadakan | 1 unit | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan | 100.% | | 1 unit | 350.000 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pemb. Nasional | Prioritas Pemb Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2021 | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja | |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------|------------|--------|----------|---|-----------|--|--------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--|--------|
| | | | | Daerah | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | Rp. | | Target | Rp. (000) | | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | | | Target |
| | | | | | Satuan | Volume | | Satuan | Volume | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | | | | | | | | | | | | keuangan perangkat daerah | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah | 195 unit | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat daerah | 100.00 | 778.000.000 | 195 unit | 1.200.000 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |
| X.XX.01.1.04 | Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | 554.050.000 | | 1.275.750 | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar | 250 Orang | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawain dan keuangan perangkat | 100.00 | 465.235.000 | 250 Orang | 937.125 | OPD Provinsi | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pemb. Nasional | Prioritas Pemb Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2021 | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja | |
|---------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--------|-------------------|---|--------|----------|------------|--------|------------|------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|--|--------|
| | | | | Daerah | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | Rp. | | Target | Rp. (000) | | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | | | Target |
| | | | | | Satuan | Volume | | Satuan | Volume | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Level Kapabilitas APIP harus mencapai level 3 sebanyak 85% KLOP | Level Kapabilitas APIP harus mencapai level 3 | Kapabilitas APIP | level | 3 | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan, Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan lainnya, Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan | persen | 100 | | | | | 12.304.605.000 | | 15.841.439 | | Inspektorat | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pemb. Nasional | Prioritas Pemb Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2021 | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja | |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------|------------|--------|----------|--|------------|---|------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------|--|--------|
| | | | | Daerah | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | Rp. | | Target | Rp. (000) | | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | | | Target |
| | | | | | Satuan | Volume | | Satuan | Volume | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| 6.01.02.1.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah I | 10 Laporan | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan wilayah I | 100% | 1.139.340.000 | 10 Laporan | 3.300.000 | Irban wil I | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah II | 10 Laporan | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan wilayah II | 100% | 1.139.340.000 | 10 Laporan | 1200.000 | Irban wil II | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah III | 10 Laporan | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan wilayah III | 100% | 1.139.340.000 | 10 Laporan | 1200.000 | Irban wil III | | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pemb. Nasional | Prioritas Pemb Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2021 | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja | |
|------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------|------------|--------|----------|---|------------|--|------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--|--------|
| | | | | Daerah | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | Rp. | | Target | Rp. (000) | | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | | | Target |
| | | | | | Satuan | Volume | | Satuan | Volume | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan | 36 Laporan | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan | 100% | 1.205.180.000 | 36 Laporan | 1.600.000 | Irbansus | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah I | 26 Laporan | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan wilayah I | 100% | 1.038.100.000 | 26 Laporan | 1.100.000 | Irbanwil I | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah II | 26 Laporan | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan wilayah II | 100% | 1.038.100.000 | 26 Laporan | 1.100.000 | Irbanwil II | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan | 26 Laporan | Persentase obyek pemeriksaan yang | 100% | 1.038.100.000 | 26 Laporan | 1.200.000 | Irbanwil III | | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pemb. Nasional | Prioritas Pemb Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2021 | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja | |
|------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------|------------|--------|----------|--|-----------|--|------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--|--------|
| | | | | Daerah | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | Rp. | | Target | Rp. (000) | | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | | | Target |
| | | | | | Satuan | Volume | | Satuan | Volume | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | | | | | | | | | | Tertentu yang dihasilkan di Wilayah III | | dilakukan pengawasaan wilayah III | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan | 3 Laporan | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan lainnya | 100% | 66.100.000 | 3 Laporan | 341.439 | Irbansus | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah I | 3 Laporan | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan lainnya wilayah I | 100% | 280.760.000 | 3 Laporan | 600.000 | Irbanswil I | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah II | 3 Laporan | Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan lainnya wilayah II | 100% | 114.960.000 | 3 Laporan | 600.000 | Irbanswil II | | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pemb. Nasional | Prioritas Pemb Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2021 | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja | |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------|----------|--|------------|---|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------|--|--------|
| | | | | Daerah | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | Rp. | | Target | Rp. (000) | | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | | | Target |
| | | | | | Satuan | Volume | | Satuan | Volume | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | | | | | | | profil manajemen risiko | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.03.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | 1.351.544.000 | | 1.433.250 | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen PPKT berbasis risiko | 1 Dokumen | Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas | 87.35. Angka | 1.351.544.000 | 1 Dokumen | 1.433.250 | | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |
| 6.01.03.1.02 | Asistensi dan Pendampingan | | | | | | | | | | | | | 4.503.025.000 | | 4.740.750 | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah APIP yang berlisensi nasional/internasional | 2 Orang | Persentase APIP berlisensi nasional/internasional | 60.% | 480.000.000 | 2 Orang | 385.875 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |
| | | | | | | | | | | Jumlah dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli | 35 Dokumen | Persentase OPD yang memiliki profil manajeme | 100.% | 862.715.000 | 35 Dokumen | 992.250 | | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pemb. Nasional | Prioritas Pemb Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2021 | Prakiraan Maju Tahun 2022 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja | |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------|------------|--------|----------|---|------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|--|--------|
| | | | | Daerah | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | Rp. | | Target | Rp. (000) | | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | | | Target |
| | | | | | Satuan | Volume | | Satuan | Volume | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | | | | | | | | | | | | n risiko | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah dokumen pencegahan dan pemberantasan korupsi | 1 Laporan | Nilai Budaya Integritas | 83.% | 2.371.240.000 | 1 Laporan | 2.425.500. | | SUB BAGIAN ADMINIST RASI DAN UMUM | |
| | | | | | | | | | | Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah | 48 Dokumen | Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko | 100.% | 592.580.000 | 48 Dokumen | 661.500 | | SUB BAGIAN PERENCA NAAN | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Surveillance ISO | 1 Dokumen | Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas | 87.35. Angka | 196.490.000 | 1 Dokumen | 275.625 | | SUB BAGIAN PERENCA NAAN | |
| Total | | | | | | | | | | | | | 48.692.907.000 | | 68.006.614 | | | | |

BAB V

PENUTUP

Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang berisi penjabaran tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh SKPD pada pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, Renja ini juga menjadi acuan dalam upaya pengawasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penguatan pengawasan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ketersediaan anggaran menjadi hal yang penting agar penguatan pengawasan dan perubahan peran Inspektorat menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* dapat terlaksana secara optimal.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu yang terangkum dalam Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Gubernur Jawa Tengah terpilih periode 2018 – 2023, khususnya di bidang Tata Kelola Pemerintahan.



Semarang, 13 Agustus 2020

INSPEKTUR PROVINSI
JAWA TENGAH

HENDRI SANTOSA, SE, Ak, M.Si. CA

Pembina Utama Madya

NIP. 19511226 198303 1 001